

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA STATUS DAN PELUNASAN  
HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI  
LUAR WILAYAH INDONESIA**



**ANDIKA RIFQILLAH**

**1810211110027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
BANJARMASIN  
2024**

**PROBLEMATIKA STATUS DAN PELUNASAN  
HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI  
LUAR WILAYAH INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**Andika Rifqillah**  
**Nim. 1810211110027**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
BANJARMASIN  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

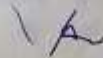
**PROBLEMATIKA STATUS DAN PELUNASAN  
HARTA DEBITUR PAILIT YANG BERADA  
DI LUAR WILAYAH INDONESIA**

Diajukan oleh

**ANDIKA RIFQILLAH**  
NIM. 1810211110027


Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,



**Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
NIP. 196709192002121003

Diketahui  
Banjarmasin, 05 Februari 2025  
Ketua Program,



**Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA STATUS DAN PELUNASAN HARTA  
DEBITUR PAILIT YANG BERADA DI LUAR  
WILAYAH INDONESIA

Diajukan oleh

ANDIKA RIFQILLAH  
NIM. 1810211110027

Skripsi ini memenuhi syarat untuk diabikan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 010/UNB.1.1158/2025

Tanggal : 10 FEB 2025



Dr. Achmad Fatchal, S.H.M.H  
NIP. 197506152003121001

**PROBLEMATIKA STATUS DAN PELUNASAN HARTA DEBITOR PAILIT  
YANG BERADA DI LUAR WILAYAH INDONESIA**

**Oleh :  
Andika Rifqillah**

**ABSTRAK**

Dalam era globalisasi, masalah kepailitan lintas batas menjadi semakin kompleks, terutama bagi debitor yang memiliki aset di luar yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara pelunasan utang debitor pailit yang asetnya berada di luar negeri dan untuk memahami status hukum aset tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai eksekusi aset debitor pailit yang berada di luar negeri. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditor, yang tidak dapat mengeksekusi aset tersebut tanpa adanya perjanjian internasional yang mengaturnya. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam pasal 212-214 UUK PKPU yang menyatakan bahwa aset di luar negeri dapat digunakan untuk melunasi utang, pelaksanaannya tetap terhambat oleh prinsip teritorialitas dan kurangnya pengakuan terhadap putusan pengadilan asing. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum di Indonesia untuk mengadopsi model hukum internasional, seperti UNCITRAL Model Law, guna memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan lintas batas. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak kreditor dan memastikan bahwa aset debitor pailit dapat dikelola secara efektif, meskipun berada di luar negeri.

**Kata Kunci : Problematika tatus, Pelunasan harta debitor Pailit**

**PROBLEMATICS OF STATUS AND SETTLEMENT OF BANKRUPT  
DEBTORS' ASSETS OUTSIDE INDONESIA TERRITORY**

**By:  
Andika Rifqillah**

**ABSTRACT**

*In the era of globalization, cross-border bankruptcy issues are becoming increasingly complex, especially for debtors who have assets outside the jurisdiction of Indonesia. This study aims to explore the method of debt repayment of bankrupt debtors whose assets are located abroad and to understand the legal status of these assets. The method used is normative legal research with a juridical approach, which analyzes relevant laws and regulations, including Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The results of the study indicate that the Indonesian Bankruptcy Law does not clearly regulate the execution of assets of bankrupt debtors located abroad. This causes legal uncertainty for creditors, who cannot execute these assets without an international agreement regulating them. Further discussion reveals that although there are provisions in articles 212-214 of the PKPU Law stating that assets abroad can be used to pay off debts, their implementation is still hampered by the principle of territoriality and the lack of recognition of foreign court decisions. The conclusion of this study emphasizes the need for legal reform in Indonesia to adopt international legal models, such as the UNCITRAL Model Law, in order to provide legal certainty in resolving cross-border bankruptcy cases. This is important to protect creditors' rights and ensure that the assets of bankrupt debtors can be managed effectively, even though they are abroad.*

*Keywords: Tatus problems, Settlement of Bankrupt Debtors' Assets*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT. Tuhan yang masa esa yang telah melimpahkan rahmatnya dengan memberikan kesehatan akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini. Penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, SH.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum ULM;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** Selaku ketua program sarjana program studi hukum Fakultas hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Rachmadi usman, S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing ketua, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat seluruh dosen fakultas hukum atas ilmunya yang di berikan kepada saya, saya dan keluarga saya sangat berterima kasih atas pelajaran yang di beri.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum.

Banjarmasin, 14 April 2025

**Andika Rifqillah**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan di pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari selasa 13 januari 2025  
dengan susunan panitia penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Djoni Sumardi Gozali  
Sekretaris/Anggota : Hj. Yulia Qamariyanti  
Anggota : H. Rachmadi Usman

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor ; 131/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal ; 09 Januari 2024

## DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL.....	
DAFTAR ISI.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Keaslian Penelitian .....	2
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Ssitematika penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Teori kepailitan.....	11
1. Definisi kepailitan.....	11
2. Syarat-syarat kepailitan.....	12
3. Pengertian perjanjian.....	14
4. Uncitral.....	16
5. Kurator.....	17
6. Kreditor.....	18
7. Debitor.....	19
8. CISG.....	19
9. Sita umum.....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Cara pelunasan debitor pailit yang hartanya berada di luar indonesia... 24	
B. Status debitor pailit yang hartanya berada di luar indonesia.....	36
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	